

# MANGKUNEGARA IV, RAJA-PENGUSAHA, PENDIRI INDUSTRI GULA MANGKUNEGARAN (1861-1881)<sup>1</sup>

*Wasino\**

## ABSTRACT

This article will analyze the history of sugar plantation owned by the indigenous people, Mangkunegara, Colomadu and Tasik Madu. Historical sources are mostly taken from archives and library of Rekso Pustoko Mangkunegaran. Other sources are also collected from National Archive Jakarta, National Library Jakarta and a number of library in Yogyakarta.

Research findings indicate that the Mangkunegaran sugar industry from the beginning represented the personal company of Mangkunegara IV which then was turned into a state (praja) company. The establishment of Mangkunegaran sugar industry was a reaction to the wide-spread establishment of Western private enterprise in the region in mid XIX century. Mangkunegaran sugar industry was a traditional industry which was intended to boost up the Mangkunegaran's bargaining position to other Javanese kings.

Key words: sugar plantation - personal - state, enterprise - traditional.

## PENDAHULUAN

**D**i kalangan bangsawan Jawa, bekerja menjadi wirausahawan sesungguhnya bukan hal yang baru. Pada sekitar tahun 1500, banyak bangsawan Jawa menjadi wirausahawan, terutama dalam sektor perdagangan baik perdagangan antarpulau maupun perdagangan antarnegara (Reid, 2004: 99-102). Akan tetapi, tradisi wirausaha di kalangan elite penguasa mengalami kemerosotan sejak Sultan Agung menjalankan politik sentralisasi kekuasaan pada perempat kedua abad ke-17. Ketika itu, para bangsawan pesisir yang umumnya para wirausahawan dihancurkan. Tindakan itu dilanjutkan oleh Sunan Amangkurat I (1647-1677) yang melarang rakyatnya berdagang ke seberang lautan, dan menutup semua pelabuhan di pantai utara Jawa

(Reid:104-105; Lombard, 2000, buku 1:104-105). Tradisi itu semakin merosot setelah pusat-pusat kegiatan usaha dipegang oleh orang-orang Belanda dengan kongsi dagangnya, VOC berhasil menaklukkan kerajaan Mataram pada pertengahan abad ke-17.

Merosotnya tradisi wirausahawan di kalangan bangsawan itu diikuti dengan berkembangnya sebuah mitos tentang pemisahan kerja antara kaum bangsawan dengan rakyat kebanyakan. Bangsawan dipandang sebagai kelas penguasa yang memiliki pekerjaan yang berbeda dengan kelas pedagang dan petani pedesaan (Lombard, 2000:103-117; Geertz, 1981).

Mangkunegara IV berusaha mematahkan mitos itu. Beberapa waktu setelah memegang tampuk pemerintahan, ia mem-

---

\* Staf Pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

bangun basis ekonomi modern, yakni perkebunan kopi (*coffee*) dan industri gula. Lahan yang semula disewakan kepada para pengusaha Barat oleh para pemegang *lungguh* untuk industri perkebunan diambil alih dan dikembangkan sendiri sebagai basis ekonomi praja.

Industri gula Mangkunegaran semula merupakan perusahaan pribadi Mangkunegara IV. Akan tetapi, menjelang wafatnya industri gula itu diwariskan kepada Praja Mangkunegaran sebagai perusahaan praja. Tulisan ini akan mengupas faktor–faktor penyebab munculnya industri gula Mangkunegaran dan perkembangannya hingga akhir abad XIX.

### **PENGHAPUSAN TANAH APANAGE SEBAGAI LANGKAH AWAL PEMBANGUNAN INDUSTRI PERKEBUNAN PRAJA**

Sebelum Mangkunegara IV berkuasa, sebagian tanah milik Praja Mangkunegaran diberikan kepada para bangsawan dan pejabat kerajaan sebagai tanah gaji. Tanah seperti ini dikenal dengan nama tanah *lungguh* atau *apanage*. Tanah-tanah itu meskipun secara hukum milik raja, tetapi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya berada di tangan para pemegang *lungguh*. Semula tanah-tanah itu dimanfaatkan untuk lahan pertanian tanaman pangan, tetapi sejak dasawarsa kedua abad XIX sebagian besar tanah-tanah itu disewakan kepada pengusaha perkebunan asing. Akibat disewakannya lahan tersebut, para bangsawan menjadi kehilangan pendapatan dari tanah bengkoknya.

Tanah *lungguh* yang disewakan kepada pengusaha perkebunan asing di wilayah Mangkunegaran dipandang oleh Mangkunegara IV kurang menguntungkan praja dan rakyat Mangkunegaran. Sehubungan dengan hal itu, raja berusaha menarik kembali tanah-tanah *apanage* yang disewakan untuk dikelolanya sendiri. Ia sadar bahwa banyak yang bisa dicapai jika tanah-tanah itu diusahakannya sendiri (Pringgodigdo, 1950: 40).

Mangkunegara IV memulai usahanya dengan tidak memperpanjang kontrak-

kontrak persewaan tanah kepada pengusaha swasta Barat yang akan berakhir pada tahun 1859/1860. Rencana itu pada tahun 1857 mendapat protes keras dari para penyewa tanah. Mereka menuduh rencana itu bukan murni gagasan Mangkunegara IV, tetapi akibat pengaruh rahasia dari oknum-oknum yang buta terhadap kepentingan negara dan rakyat Hindia Belanda. Dalam hal ini, yang dituduh adalah Residen Surakarta, Busckens. (Margana, 1997/1998:74). Meskipun mendapat banyak protes dari para pengusaha swasta, Mangkunegara IV tetap bersikeras untuk menjalankan rencananya itu. Tanah-tanah yang telah bebas itu akan diusahakannya sendiri untuk keperluan industri perkebunan (Mansveld, tanpa tahun:bab II).

Penarikan tanah dimulai dari kalangan keluarga raja yang berlangsung dari tahun 1862-1871. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan para *patuh* lainnya, termasuk para anggota *Legiun* Mangkunegaran. Tindakan ini mendapat dukungan dari residen Nieuwenhuizen. Pada tahun 1871 tanah *lungguh* yang telah ditarik mencapai luas 121,25 *jung* atau 485 bau yang berasal dari *lungguh* yang diberikan kepada delapan putra Mangkunegara II, dua putra Mangkunegara III, tiga putra Mangkunegara IV, dan seorang saudara dari Mangkunegara IV (Margana, 1997/1998:82).

Mereka yang telah ditarik tanah *lungguh*-nya diganti dengan tunjangan dalam bentuk uang. Jumlah ganti rugi untuk setiap pemegang *lungguh* tidak sama tergantung luas tanah *lungguh* dan kualitas tanah yang dimilikinya. Akan tetapi sebagai dasar umum untuk menentukan ganti rugi ditentukan setiap *jung* nya sebesar f 120 per tahun atau f 10 tiap bulannya. Karena tanah-tanah yang dimiliki para anggota keluarga kerajaan lebih subur, uang yang diterima tiap bulannya menjadi lebih besar. Selain itu, mereka juga menerima pembagian keuntungan jika hasil usaha atas tanah-tanah yang ditarik itu menghasilkan keuntungan yang besar. Setelah tanah-tanah itu ditarik dan digunakan oleh raja, maka penggunaan tanah secara sepenuhnya berada di tangan raja.

Jumlah gaji tiap bulan sebagai ganti rugi tanah *lungguh* yang ditarik untuk masing-

masing distrik atau *kawedanan polisi* tidak sama. Di Distrik Kota, pejabat tertinggi di tingkat *kawedanan*, yakni *wedana gunung* menerima ganti rugi berupa gaji sebesar f 350 per bulan. Sementara itu, di Kawedanan Karang Anyar, seorang *wedana gunung* hanya memperoleh gaji f 300 per bulan. Para *priyayi polisi* yang posisinya di bawah *Wedana Gunung* menerima gaji lebih rendah, mereka menerima gaji berkisar antara f 10- f 30.<sup>2</sup> Perbedaan penerimaan gaji pejabat di wilayah Kota dengan Karang Anyar itu disebabkan oleh nilai tanah yang berbeda, tanah di Distrik Kota lebih subur dibandingkan dengan Distrik Karang Anyar.

### MOTIVASI PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA MANGKUNEGARAN

Selain untuk penanaman kopi, sebagian tanah lungguh yang telah diambil alih oleh Praja Mangkunegaran dipergunakan untuk pengembangan industri gula. Tanaman kopi mencakup wilayah dataran tinggi seperti di lereng sebelah barat Gunung Lawu (Distrik Jumapala, Karang Pandan), dan Wanagiri bagian timur. Sementara itu, di dataran rendah Malang Jiwan dan Karang Anyar (kedua daerah itu sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Karang Anyar) digunakan untuk pengembangan industri gula. Wilayah industri gula mencakup pabrik gula dan wilayah perkebunan tebu (*Saccharum Officinatum*). Pabrik gula yang dibangun pada masa pemerintahan Mangkunegara IV adalah pabrik gula Colo Madu dan Pabrik Gula Tasik Madu.

Ada keraguan tentang siapa pemrakarsa dalam pendirian pabrik gula Mangkunegaran, apakah memang berasal dari kalangan Mangkunegaran atau dari orang Belanda. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa industri gula itu memang didirikan atas prakarsa Mangkunegara IV. Keinginan untuk mendirikan industri gula Praja Mangkunegaran berawal dari kunjungannya ke tempat putra menantunya di Demak yang ketika itu menjabat adipati di wilayah itu. Ia mengamati bahwa pohon tebu ternyata dapat tumbuh di wilayah tempat tumbuhnya pohon kelapa yang biasa digunakan sebagai bahan dasar industri gula Jawa. Di wilayah Mangku-

negaran juga terdapat lahan seperti itu yang dapat dipergunakan untuk perkebunan tebu, yakni di Kawedanan Malang Jiwan. Mangkunegara IV memandang bahwa di wilayahnya perlu dibangun perkebunan tebu pula yang dilengkapi dengan industri gula milik Mangkunegara sendiri (Mansveld, tanpa tahun:34).

Untuk melaksanakan gagasannya itu, pertama-tama diangkatlah seorang *priyayi Demak* bernama Raden Ranaastra sebagai *wedana* di Malang Jiwan. Ia diangkat menjadi pejabat di Mangkunegaran dengan pertimbangan memiliki pengalaman dalam pengembangan tanaman tebu di wilayah Demak. Gagasan Mangkunegara IV itu juga mendapat dukungan dari Manuel, pemilik perkebunan *Indigo* (nila) di Baron. Ia adalah seorang Belanda yang menjadi sahabat karib dari Mangkunegara IV. Ia memberikan nasihat kepadanya agar mengembangkan tanaman tebu dan mengalihkan usaha penduduk Malang Jiwan dari produsen gula Jawa secara tradisional menjadi produsen gula pasir di bawah pengelolaan Praja Mangkunegaran. Melalui usaha baru itu, diharapkan nilai keuntungan yang akan diperoleh oleh rakyat dan Praja Mangkunegaran akan lebih besar dibandingkan dengan usaha sebelumnya (Arsip MN P 1761).

Minat Mangkunegara IV untuk melakukan kegiatan bisnis sebagai tambahan pendapatan praja sesungguhnya melanjutkan tradisi nenek moyangnya, Mangkunegara I. Dalam catatan harian yang ditulis oleh seorang prajurit wanita disebutkan bahwa Mangkunegara I telah menempuh berbagai cara untuk menambah penghasilannya. Salah satu cara yang ditempuh adalah mulai menghasilkan produk-produk yang dapat dijual kepada VOC. Dalam suratnya tahun 1792, pendiri Praja Mangkunegaran ini meminta kepada Kompeni agar diberi petunjuk mengenai penanaman lada (*Piper nigrum*) dan nila (*Indigofera suffruticosa*) yang belum diketahui rakyatnya. Pada pertengahan abad XIX, keturunannya Mangkunegara IV bekerja sama dengan orang Belanda untuk membangun industri perkebunan, termasuk perkebunan tebu (Annkumar, dalam *Indonesia* nomor 29, 1980:35).

Pembangunan industri perkebunan, terutama perkebunan tebu oleh Mangkunegara IV merupakan pilihan yang rasional karena sejumlah alasan. *Pertama*, gula merupakan produk ekspor yang pada waktu itu sedang naik daun di pasaran dalam negeri maupun internasional. *Kedua*, tanaman tebu sudah terbiasa ditanam di sejumlah tempat di Surakarta, termasuk Mangkunegaran yang diusahakan oleh para penyewa tanah bangsa Barat. *Ketiga*, sumber-sumber pendapatan praja secara tradisional melalui pajak dan persewaan tanah dirasakan tidak mencukupi (Annkumar, 1980:30-31).

Sejumlah alasan itu tercermin dalam pernyataan Sri Mangkunegara IV dalam kutipan berikut.

“Tanah itu akan saya gunakan untuk industri agar hasilnya lebih banyak, sehingga bermanfaat bagi seluruh rakyat Mangkunegaran, sebab pajak tanah tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan Mangkunegaran” (Mansveld, tanpa tahun:28).

Selain ketiga faktor itu, faktor lain yang mendorong pembangunan industri gula Mangkunegaran adalah kepentingan pihak trah Mangkunegaran untuk menunjukkan posisinya yang lebih menonjol dalam bidang ekonomi dibandingkan dengan ketiga *Praja Kejawan* lainnya, yakni Kesunanan, Kesultanan, dan Pakualaman. Strategi ini sebagai kelanjutan dari strategi lain seperti pembangunan korps militer dengan nama *Legiun Mangkunegaran*, dan politik perkawinan dengan keluarga Kesunanan.

Terkait dengan alasan tersebut di atas, pembangunan industri gula oleh Mangkunegara IV adalah sebagai usaha memperluas kebebasannya dari pengaruh Sunan dan Belanda dengan cara meniru sistem eksploitasi yang menguntungkan seperti telah dilakukan oleh para pengusaha swasta Eropa. Keuntungan eksploitasi itu dapat digunakan untuk memperoleh pengaruh yang lebih besar tidak hanya terhadap raja-raja Jawa, tetapi juga Belanda. (Houben, dalam C.D. Grijns dan S.O. Robson, 1986).

Minatnya yang besar untuk memperbaiki posisi trah Mangkunegaran melalui ekonomi

terlihat dalam beberapa *tembang Sinom* yang termuat dalam *Serat Wedatama*. Dalam satu *tembang*, Mangkunegara IV memberikan nasihat kepada rakyatnya bahwa yang penting dalam kehidupan adalah mencari nafkah. Setelah nafkah tercukupi baru dilanjutkan dengan memenuhi kebutuhan lain, misalnya ilmu agama. Pada *tembang* yang lain dikemukakan bahwa orang hidup akan memiliki arti jika memiliki tiga hal, yakni *wirya* atau jabatan, *arta* atau kekayaan, dan *winasis* atau kepandaian. Mereka yang tidak memiliki salah satu dari tiga hal itu dipandang rendah derajatnya (*aji godong jati aking*). (Darmosarkoro, 1996/1997):50-51 dan 60-62).

## PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA MANGKUNEGARAN

Untuk membangun perkebunan tebu, pertama kali Mangkunegara IV memilih tempat di desa Krambilan, Distrik Malang Jiwan yang terletak di sebelah utara Kartosura.<sup>3</sup> Pemilihan tempat itu dengan pertimbangan tanahnya subur dan tersedia air yang mengalir secara memadai serta terdapat semak belukar yang cocok untuk keperluan itu. Ia memerintahkan R Kamp, seorang ahli tanaman tebu berkebangsaan Jerman, untuk meneliti apakah tanah-tanah itu cocok untuk tanaman tebu atau tidak. Setelah melalui proses penelitian ternyata di wilayah itu tanahnya cukup sesuai untuk ditanami tebu (*Arsip Rekso Pustoko, P 1761*).

Setelah mendapat persetujuan dari Residen Surakarta, Nieuwenhuiz, Mangkunegara IV memerintahkan seorang ahli berkebangsaan Jerman, R. Kamp untuk membangun sebuah pabrik gula (Pringgodigdo, 1950:48). Peletakan batu pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 1861. Biaya pembangunan pabrik mencapai f 400.000. Modalnya sebagian besar diperoleh dari pinjaman yang berasal dari hasil keuntungan perkebunan kopi Mangkunegaran. Selain itu, juga mendapat bantuan pinjaman dari Mayor Cina di Semarang Be Biau Tjwan, teman dekat Mangkunegara IV (*Arsip MN P 1761*).

Pada tahun 1862, pabrik gula itu sudah siap untuk dioperasikan. Dalam upacara pembukaan pabrik itu Mangkunegara IV memberi

kan nama pabrik pertamanya itu *Colo Madu*, suatu nama Jawa yang artinya gunung madu. Tidak ada penjelasan resmi mengapa menggunakan istilah itu, tetapi jika dilihat dalam tradisi penguasa Jawa, maka nama itu mengandung suatu harapan agar kehadiran industri gula ini menjadi simpanan kekayaan Praja Mangkunegaran dalam bentuk butiran gula pasir berjumlah besar hingga menyerupai gunung.<sup>4</sup>

Karena merupakan perusahaan pribadi, kendali perkebunan tebu berada di tangan Sri Mangkunegara IV. Akan tetapi, pengelolaan perusahaan sehari-hari berada di tangan seorang administrator, yang untuk pertama kalinya dipercayakan kepada R. Kamp. Ia hanya memegang manajemen pabrik gula Colo Madu selama 8 tahun, pada tahun 1870 ia digantikan oleh putranya G Smith, karena ia mendapat tugas dari Mangkunegara IV untuk mengelola perkebunan lain milik Mangkunegaran, yaitu perkebunan kopi yang memerlukan perombakan dan perluasan tanam (*Arsip Rekso Pustoko, YN 992*).

Dari data-data itu terlihat bahwa industri gula dibangun dan dikelola secara profesional. Industri gula tidak dipercayakan kepada bangsawan atau keluarga Mangkunegaran, tetapi dipercayakan kepada seorang administrator yang berpengalaman dalam pengelolaan perkebunan sekalipun ia berasal dari bangsa asing, yaitu bangsa Jerman.

Pabrik gula Colo Madu telah direncanakan jauh ke depan. Menurut sebuah sumber, instalasinya memadai sesuai dengan standar pabrik gula saat itu. Dalam panen perdana tahun 1862, dari 135 bahu sawah yang ditanami tebu menghasilkan 6.000 pikul gula atau 45 pikul tiap bahunya (*Arsip Rekso Pustoko, P 1761*). Produksi sebesar itu merupakan produksi yang sudah baik untuk waktu itu karena dapat menyamai rata-rata produksi gula per pikul di Jawa pada tahun 1870 (Gonggrijp, 1938:149).

Selain untuk konsumsi lokal, produksi gula juga dijual ke Singapura dan Bandaneira. Penjualan itu tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui perantara firma *Cores de Fries*. Harga gula di Singapura f 42 per kuintal, sedangkan di Bandaneira f 57 per kuintal. Dengan harga yang baik itu, gula dari

Colo Madu telah memberikan keuntungan memadai bagi Praja Mangkunegaran (Pringgogido, 1950:48).<sup>5</sup>

Produksi yang baik dan harga yang memadai telah memberikan iklim yang menggerakkan terhadap pertumbuhan industri gula Mangkunegaran. Pertumbuhan industri gula telah menyebabkan surplus dalam manajemen pabrik. Akibatnya, utang-utang yang semula dipinjam untuk modal pembangunan pabrik pada tahun 1870 sudah dapat dilunasi (*Arsip Rekso Pustoko, P 1761*).

Keberadaan industri gula ini sangat membantu penghasilan Praja Mangkunegaran untuk melengkapi sumber pendapatan tradisionalnya dari pajak tanah. Keuntungan yang diperoleh dari pabrik gula sebagian digunakan raja untuk membayar gaji para bangsawan dan sebagian lagi dapat digunakan untuk menebus tanah *lungguh* yang belum selesai ditarik kembali (Mansveld, tanpa tahun:37).

Keberhasilan pabrik gula Colo Madu mendorong Mangkunegara IV membangun pabrik gula kedua, yaitu pabrik gula Tasik Madu. Pabrik gula kedua ini letaknya di Desa Sandakara, distrik Karang Anyar. Wilayah ini merupakan dataran rendah yang terletak di sebelah barat lereng Gunung Lawu dan sebelah timur Kota Solo, tepatnya di tepi jalan Solo-Karang Pandan. Peletakan batu pertama pembangunan bangunan pabrik dilakukan tanggal 11 Juni 1871. Pabrik gula diselesaikan pembangunannya tahun 1874. Menurut Mansveld, ukuran gedung-gedungnya dibuat dengan suatu ukuran yang tergolong mewah dibanding dengan pabrik gula lain di *Praja Kejawen* saat itu. Nama pabrik gula juga mengambil konsep kebesaran alam, yakni Tasik yang berarti laut dan Madu yang berarti gula. Dengan demikian, ada harapan dari sang pangeran agar hasil gula di pabrik gula ini melimpah ruah bagaikan lautan madu (Mansveld, tanpa tahun:43)

Seperti pabrik gula pertama, pengelolaan pabrik berada di bawah komando Mangkunegara IV sendiri. Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari, pada tahun 1874 ditunjuk H. Kamp sebagai administrator pabrik gula.

Seperti halnya pabrik gula Colo Madu, perekrutan tenaga kerja untuk menanam tebu di Tasik Madu menggunakan struktur feodal. Petani penggarap di sekitar pabrik dikenakan kerja wajib tanam tidak dibayar. Mula-mula lahan yang digunakan untuk tanaman tebu Tasik Madu seluas 200 *bahu* meliputi dua desa di sekitar pabrik.

Semula kegiatan produksi pabrik gula Tasik Madu tidak teratur, hanya berlangsung jika hasil kopi Mangkunegaran kurang menghasilkan keuntungan yang memadai untuk keperluan Praja Mangkunegaran. Kegiatan produksi secara teratur baru terjadi setelah pihak manajemen pabrik gula mengadakan *Consignatie Contract* (kontrak konsinyasi) dengan *Nederland Handels Matschappij (NHM)* di Semarang. Maskapai ini memberikan modal kerja yang diperlukan bagi proses produksi pabrik gula ini (Pringgogdogdo, 1950: 49).

Sejalan dengan perkembangan peningkatan permintaan gula yang harus diproduksi oleh pabrik, maka lambat laun jumlah tanaman tebu diperluas. Penanaman tebu tidak hanya meliputi distrik Karang Anyar, tetapi juga meluas ke wilayah lain. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa pada tahun 1886 tanah-tanah di Kutuan yang ketika itu masuk dalam wilayah Indigo di Matesih khususnya di Mayaretna, sebagian di antaranya digunakan untuk menanam bibit tebu. Perluasan ini juga disebabkan menurunnya produksi perusahaan Indigo (*Arsip Rekso Pustoko, P 1760*).

Selain digerakkan dengan tenaga air, pabrik gula Tasik Madu digerakkan dengan tenaga uap. Tenaga penggerak utama adalah air, sedangkan tenaga uap hanya sebagai tenaga cadangan. Tenaga uap itu kemudian dihapus sehubungan dengan dimasukkannya berbagai mesin pabrik gula baru, antara lain dengan kualifikasi *double effect* (1873), dan *triple effect* (1875), serta dan instalasi *carbonatie* (1876).

Karena belum ada jalur kereta api yang menghubungkan antara Surakarta dan Sragen, maka transportasi gula dari Tasik Madu ke ibu kota Solo menggunakan cicar,

sedangkan dari Surakarta ke Semarang menggunakan kereta api. Transportasi ini mengalami perubahan setelah dibuka jalur kereta api jurusan Solo-Surabaya sebagai bagian dari jalan kereta api pemerintah *Staats-Spoorwegen* (SS) sejak tanggal 24 Mei 1884. Produksi gula dari pabrik gula Tasik Madu yang akan dikirim ke Semarang tidak lagi diangkut dengan cicar ke Surakarta, tetapi dengan menggunakan lori dari pabrik gula ke stasiun Kemiri yang jaraknya hanya 5 km ke arah utara. Lori dari pabrik gula ini baru dibangun setelah Mangkunegara IV wafat, yaitu oleh penggantinya, Mangkunegara V. Loko pertama untuk menarik gerbong kereta pengangkut gula dibeli tahun 1883 (Mansveld, tanpa tahun:43-44).

Pabrik gula Mangkunegaran memiliki arti penting dalam perkembangan produksi gula di Jawa pada masa itu. Begitu pentingnya pabrik ini, Brooshooft dalam tulisannya di harian *De Locomotief* mengemukakan bahwa ketika itu pabrik gula Mangkunegaran sangat terkenal dan dibuat selengkap mungkin meskipun harus menelan biaya yang besar. Tiap orang asing, pegawai tinggi atau swasta yang berkunjung ke Solo mohon kepada Mangkunegara untuk melihat pabriknya (*De Locomotief* 2 September 1881).

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil beberapa pokok kesimpulan. *Pertama*, tradisi wirausaha di kalangan bangsawan bumiputra tidak hilang sama sekali ketika dominasi politik Jawa berada di tangan Belanda dan ekonomi di tangan pengusaha swasta Barat. *Kedua*, selain faktor struktural berupa lingkungan ekonomi perkebunan yang telah berkembang di wilayahnya dan konstelasi politik di wilayah Praja Kejawen, munculnya industri gula Mangkunegaran juga disebabkan faktor kreativitas Mangkunegara IV untuk mencari alternatif sumber pendapatan praja. *Ketiga*, mode produksi industri gula Mangkunegaran pada masa Mangkunegara IV merupakan campuran antara mode produksi feodalistik dan kapitalistik.

- <sup>1</sup> Artikel ini didasarkan pada bab III dari naskah disertasi penulis dalam Ilmu Sejarah, Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2004.
- <sup>2</sup> Lihat *Pranatan Enggal Kawontenanipun Priyantun Pulisi Sajajaripun salebeting Kitha Mangkunegaran*, dan *Pranatan Enggal Kawontenanipun Priyantun Pulisi Sajajaripun ing Kawedanan Karang Anyar* dalam Arsip MN IV Rekso Pustoko Mangkunegaran kode H a., hlm. 208 dan 203.
- <sup>3</sup> *Krambilan* berasal dari kata dasar *krambil* dengan mendapat akhiran "an" yang berarti tempat atau daerah *krambil* atau kelapa. Memang wilayah itu sebelum dibangun pabrik gula tebu merupakan tempat industri gula kelapa yang bahan dasarnya diambil dari kelapa di daerah Krambilan. Dengan demikian, pendirian industri gula Colo Madu sebagai perubahan dari industri gula Jawa (gula kelapa) menjadi industri gula pasir (gula tebu).
- <sup>4</sup> Dalam konsep kebudayaan Jawa, gunung memiliki arti yang cukup penting dalam tatanan semesta ini. Gunung di satu sisi dianggap sebagai pusat kekuasaan para Dewa, seperti Mahameru, dan orang suci seperti Lawu namun di sisi lain juga untuk menunjukkan ungkapan bagi sesuatu yang sangat besar.
- <sup>5</sup> Harga gula di Bandaneira jauh lebih mahal dibandingkan dengan di Singapura karena dua alasan, yaitu: pertama, di Singapura gula dijual kepada tengkulak yang akan dijual kembali ke pasar internasional, sementara di Bandaneira dijual kepada konsumen. Kedua, jalur perdagangan ke Singapura lebih mudah dijangkau dibandingkan ke Banda sehingga ongkos kirim lebih mahal. Mengenai jaringan perdagangan antarnegara dan antarpulau melalui laut Jawa pada abad XIX, lihat Singgih Tri Sulistiyono, 2003:119-174).

#### DAFTAR RUJUKAN

- A.K. Pringgogidgo. 1950. *Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoenagaroche Rijk*. 's-Gravenhage: Nijhoff
- Ankumar. 1980. "Javanese Court Society and Politics in the Late Eighteenth Century: The Record of a Lady Soldier", dalam *Indonesia* nomor 29. Cornell Modern Indonesian Project.
- Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran bundel P 1760.
- Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran bundel P 1761.
- Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran bundel YN 1992.
- De Locomotief* 2 September 1881.
- Geertz. 1981. *Clifford, Abangan Santri dan Priyayi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gonggrijp, G. 1938. *Schets Eener Economische Geschiedenis van Nederlandsch-Indie*, Haarlem.
- Houben, Vincent J.H. 1986. "The Position of the Mangkunegara Within partitioned Political Structure of Central Java", dalam C.D. Grijns dan S.O. Robson, *Cultural Contact and Textual Interpretation*, Dordrecht: Foris Publications.
- Laporan N.G.F. Raad tanggal 21 April 1894 (Arsip MN P 1761).
- Lombard, Denys. 2004. *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-Batas Pembaratan* (buku I). Jakarta: Gramedia, 2000; LP3ES.
- Mansveld, W.F. *Geschiedenis der Eigendomen van het Mangkoenagorische Rijk*, (Surakarta: Koleksi Rekso Pustoko Mangkunegaran, tanpa tahun).
- N.G.F. Raad tanggal 21 April 1894 (Arsip MN P 1761).
- Reid, Anthony J.S. 2004. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Sarjono Darmosarkoro. 1996/1997. *Serat Wedatama yasan K.G.P.A.A. Mangkunegoro IV*, bagian tembang Sinom nomor 11 dan 15.
- Singgih Tri Sulistiyono. 2003. "The Java Sea Network: Patterns in the Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s", Leiden: *Disertasi* untuk memperoleh gelar doktor di Universitas Leiden.